



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKJIP

2025



kesbangpol.gresikkab.go.id



bakesbangpol@gresikkab.go.id



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan lindungannya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025, sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Penyusunan laporan kinerja ini merupakan upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik untuk menyempurnakan kinerja SKPD Bakesbangpol Kabupaten Gresik dalam melaksanakan tugas dan fungsi urusan pemerintahan umum tahun 2025.

Laporan kinerja tahunan ini sekaligus merupakan pertanggungjawaban Kepala Badan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik untuk mencapai tugas yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 serta Tahun 2025-2029. Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan program dan kegiatan tahun anggaran 2025 ini menyajikan pertanggungjawaban Kinerja Pemerintahan Bakesbangpol Kabupaten Gresik yang transparan dan akuntabel, serta untuk memenuhi harapan masyarakat untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Sangat disadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja Tahunan ini masih banyak kelemahan dan kekurangannya, namun demikian diharapkan dapat dijadikan tolok ukur terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khususnya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik.

Gresik, Februari 2026

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Gresik



NANANG SETIAWAN, S.IP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700105 199003 1 008



Ringkasan Eksekutif

Program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik didasarkan pada sasaran strategis target kinerja dan tujuan yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik periode 2021-2026, RPJMD Kabupaten Gresik periode 2025-2029, Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik periode 2021-2026, serta Renstra Bakesbangpol Kabupaten Gresik periode 2025-2029 secara konsisten dan berkesinambungan. Oleh karena itu, pada periode Renstra 2021-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik telah menetapkan 1 (satu) tujuan strategis, 5 (lima) sasaran strategis, serta 6 (enam) program, 10 (sepuluh) kegiatan, dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan, dengan disediakan pagu anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.23.444.971.829,74,- (Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Tujuh Puluh Empat Rupiah).

Sedangkan pada periode Renstra 2025-2029 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik telah menetapkan 1 (satu) tujuan strategis, 2 (dua) sasaran strategis, serta 6 (enam) program, 10 (sepuluh) kegiatan, dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan, dengan disediakan pagu anggaran PAPBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.25.455.761.240,- (Dua Puluh Lima Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah).

Meskipun seluruh sub kegiatan yang telah dilaksanakan mencapai target fisik sebesar 100%, namun masih terdapat variasi pada ketercapaian realisasi keuangannya. Dimana realisasi keuangan pada sebagian sub kegiatan tidak bisa diserap secara maksimal karena adanya kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana yang tertuang pada :

- 1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Sehingga untuk realisasi capaian target fisik dan keuangan selama tahun 2025 untuk pelaksanaan program, kegiatan, maupun sub kegiatan tidak dapat memenuhi target awal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat ringkasan realisasi capaian tahun 2025 sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Kegiatan :

1. Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan capaian target fisik 100% dan realisasi keuangannya 77,38%.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan capaian target fisik 100% dan realisasi keuangannya 30,60%.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub Kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan capaian target fisik 100% dan realisasi keuangannya 88,52%.
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub Kegiatan :
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan capaian target fisik 100% dan realisasi keuangannya 85,30%.
 - Penyediaan Bahan logistik Kantor dengan capaian target fisik 100% dan realisasi keuangannya 74,19%.
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan capaian target fisik 100% dan realisasi keuangannya 82,77%.
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan capaian target fisik 100% dan realisasi keuangannya 47,17%.
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan capaian target fisik 100% dan realisasi keuangannya 94,06%.
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan capaian target fisik 100% dan realisasi keuangannya 71,87%.
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan :



- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan capaian target fisik 100% dan realisasi keuangannya 77,75%.
- 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan capaian target fisik 100% dan realisasi keuangannya 98,20%.
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan capaian target fisik 100% dan realisasi keuangannya 94,80%.
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan capaian target fisik 100% dan realisasi keuangannya 42,09%.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya dengan capaian Target Fisik 100%, dan realisasi keuangannya 99,08%.

b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Dengan Kegiatan :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan Sub Kegiatan :
 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan capaian target fisik 100% dan realisasi keuangannya 75,87%.
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan capaian target fisik 100% dan realisasi keuangannya 88,92%.

c. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Dengan Kegiatan :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan

Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan sub kegiatan :

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Penigkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan capaian target fisik 100% dan realisasi keuangannya 46,68%.
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Penigkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan capaian target fisik 100% dan realisasi keuangannya 100%.

d. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Dengan Kegiatan :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan sub kegiatan :
 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan capaian target fisik 100% dan realisasi keuangannya 54,72%.

e. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Dengan Kegiatan :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan sub kegiatan :
 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan capaian target fisik 100% dan realisasi keuangannya 27,74%.
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat



Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan capaian target fisik 100% dan realisasi keuangannya 85,24%.

f. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial Dengan Kegiatan :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan sub kegiatan :
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah dengan capaian target fisik 100% dan realisasi keuangannya 81,25%.

Berdasarkan laporan ketercapaian realisasi fisik dan realisasi keuangan diatas, dapat disimpulkan bahwasannya secara umum kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025 pada kategori bagus. Hal tersebut dapat terlihat dari hasil penyerapan pagu anggaran pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.25.455.761.240,- dapat terealisasi sebesar Rp.23.411.998.004,92 atau sebesar 91,97%. Adapun untuk realisasi kinerja fisik dari seluruh sub kegiatan pada tahun 2025 sebesar 100%. Sedangkan besaran efisiensi pada tahun 2025 sebesar Rp. 2.043.763.235,08,- atau sebesar -8,03%. Berdasarkan data tersebut realisasi keuangan yang belum terserap secara optimal dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan kinerja pada periode tahun anggaran selanjutnya, berikut merupakan beberapa perbaikan yang dilakukan diantaranya evaluasi perencanaan anggaran, optimalisasi penjadwalan kegiatan, sinkronisasi pelaporan, dan penguatan analisis efisiensi. Adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 ini diharapkan menjadi pemicu dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik dan optimal, khususnya bagi seluruh stakeholder dan pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik untuk tahun selanjutnya.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Landasan Hukum	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Data Organisasi	4
1.4 Permasalahan Utama	8
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1 Rencana Strategis	11
2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025 Periode Renstra 2021-2026	15
2.3 Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025 Periode Renstra 2025-2029	16
2.4 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 202	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1 Pengukuran Kinerja	20
3.2 Capaian Kinerja Organisasi	20
BAB IV PENUTUP	45
4.1 Kesimpulan	45
4.2 Rekomendasi Kebijakan	45
LAMPIRAN	47



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Susunan Pegawai Berdasarkan Jabatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik	6
Tabel 2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	6
Tabel 3	Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang	7
Tabel 4	Jumlah Sarana dan Prasarana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025	7
Tabel 5	Matriks Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik	9
Tabel 6	Sasaran Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik	16
Tabel 7	Sasaran Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik	17
Tabel 8	Rencana Kerja dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025	18
Tabel 9	Skala Nilai Peringkat Kinerja	20
Tabel 10	Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Periode Renstra Tahun 2021-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik	21
Tabel 11	Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Periode Renstra Tahun 2025-2029 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik	23
Tabel 12	Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021-2026	23
Tabel 13	Capaian Kinerja Renstra Tahun 2025-2029	25
Tabel 14	Periode Renstra Tahun 2021-2026	26
Tabel 15	Periode Renstra Tahun 2025-2029	27
Tabel 16	Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026	28
Tabel 17	Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029	30
Tabel 18	Periode Renstra Tahun 2021-2026	31
Tabel 19	Periode Renstra Tahun 2025-2029	34
Tabel 20	Alokasi Anggaran Renstra Tahun 2021-2026	36
Tabel 21	Alokasi Anggaran Renstra Tahun 2025-2029	38
Tabel 22	Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026	39
Tabel 23	Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029	41
Tabel 24	Program/Kegiatan Penunjang Renstra Tahun 2021-2026	42
Tabel 25	Program/Kegiatan Penunjang Renstra Tahun 2025-2029	43



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik	5
----------	--	---



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025 ditetapkan dan mengacu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis



- Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2015 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 8);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
 19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
 20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 65 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;
 21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Gresik;
 22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2025 tentang Sistem Kerja Pasca Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;



23. Peraturan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Nomor 285 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Nomor 699 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1 Maksud

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan gambaran informasi pelaksanaan serta capaian realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan selama tahun anggaran 2025 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, serta Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

1.2.2 Tujuan

Melalui penyajian mengenai gambaran dan informasi tentang pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2025 secara komprehensif, penyusunan laporan ini berperan dan bertujuan sebagai media pelaporan sistem akuntabilitas instansi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik yang dapat menjadi acuan dan analisis lanjutan yang mengarah pada sinergitas, sinkronisasi, dan integritas Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

Laporan ini juga berorientasi untuk sarana perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan disertai analisis lanjutan dengan tujuan untuk mengidentifikasi masukan-masukan penting guna perbaikan kinerja pada masa berikutnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan



Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dan Tahun 2025-2029.

1.3 DATA ORGANISASI

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik mempunyai tugas pokok Urusan Politik dan Pemerintahan Umum dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan

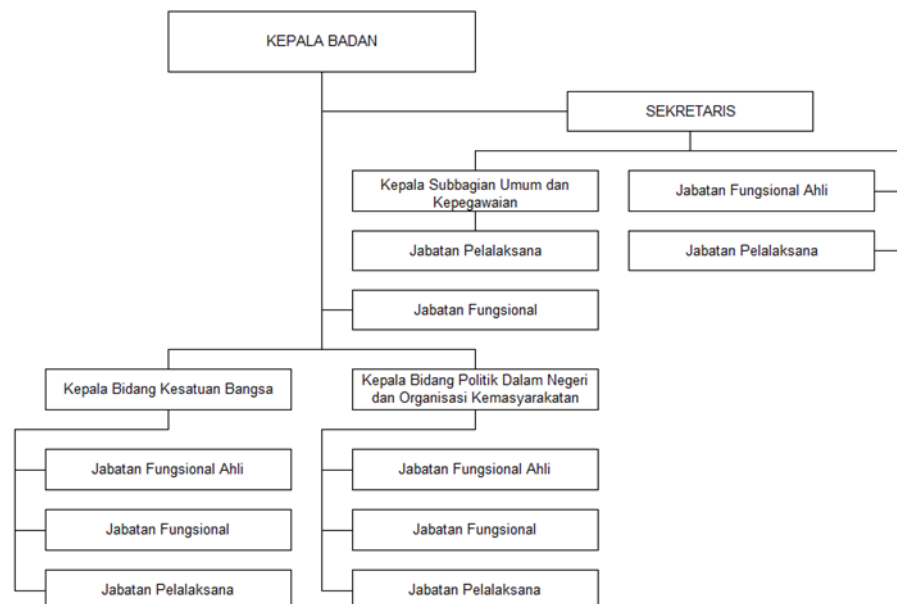
- kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
 - f) Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan / kantor kesatuan bangsa dan politik Kabupaten;
 - g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati;

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, adapun susunan organisasinya sebagai berikut:

- 1. Kepala Badan;
- 2. Sekretariat, terdiri dari
 - a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 3. Bidang Kesatuan Bangsa;
- 4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;

Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik lebih jelas dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :

Gambar 1
Struktur Organisasi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik





Secara operasional, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 35 orang yang terdiri dari 31 orang pegawai ASN (88,6%) dan 4 orang pegawai non ASN (11,4%). Secara terperinci data aparatur/pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik berdasarkan jabatan, pendidikan, pangkat/golongan ruang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Susunan Pegawai Berdasarkan Jabatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Badan	1 orang
2.	Sekretaris	1 orang
3.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1 orang
4.	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa	1 orang
5.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	1 orang
6.	Kelompok Jabatan Fungsional	7 orang

Tabel 2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	ASN	Non ASN	Jumlah
Strata 2 (S-2)	3	-	3
Strata 1 (S-1) / Diploma 4 (D-4)	19	3	22
Diploma 3 (D-3)	2	1	3
SMA	6	-	6
Jumlah	30	4	34



Tabel 3
Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Pangkat/Golongan Ruang	Jumlah
Pembina Utama Muda (IV/c)	1
Pembina Tingkat I (IV/b)	-
Pembina (IV/a)	2
Penata Tingkat I (III/d)	4
Penata (III/c)	1
Penata Muda Tingkat I (III/b)	5
Penata Muda (III/a)	9
Pengatur Tingkat I (II/d)	2
Pengatur (II/c)	2
Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-
Pengatur Muda (III/a)	-
Golongan IX (PPPK)	2
Golongan V (PPPK)	2
Jumlah	30

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 4
Jumlah Sarana dan Prasarana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025

No.	Nama Barang	Jumlah
1.	Kendaraan roda empat	8 unit
2.	Filling cabinet	2 buah
3.	Lemari arsip	3 buah
4.	Air conditioner	9 buah
5.	Laptop	7 unit
6.	Komputer PC	15 unit
7.	Printer	3 unit



8.	Meja rapat	2 buah
9.	Kursi pejabat	6 buah
10.	Sound system	1 buah
11.	CCTV	1 buah
12.	Proyektor	1 buah
13.	Layar proyektor	3 buah
14.	Lemari es	1 buah
15.	Televisi	2 buah

1.4 PERMASALAHAN UTAMA

Perumusan isu-isu strategis berorientasi pada penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik. Isu dapat ditentukan dari permasalahan pre eksisting/akan terjadi selama periode perencanaan atau potensi yang belum dikelola dengan baik. Permasalahan dan potensi yang dijadikan isu strategis adalah yang memiliki pengaruh besar terhadap kinerja pembangunan daerah. Oleh karena itu, isu strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik yaitu “Potensi Konflik Sosial (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan). Adapun isu strategis pada Bakesbangpol Kabupaten Gresik dapat dilihat pada matriks dibawah ini :



Tabel 5
Matriks Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Gresik

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Jawa Timur	
a. Meningkatnya peran Lembaga Legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. b. Berkembangnya partisipasi politik masyarakat. c. Berkembangnya ormas sebagai asset Pembangunan.eran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam penyelesaian konflik sosial. d. Peran forum-forum sebagai mitra strategis	a. Nilai-nilai ideologi Pancasila yang mulai menipis. b. Kurangnya peran dan partisipasi ormas. c. Masih tingginya penyalahgunaan narkoba. d. Belum optimalnya peran forum sebagai mitra pemerintah daerah. e. Belum optimalnya	a. Penanggulangan kemiskinan b. Kemandirian pangan c. Pengendalian pertumbuhan penduduk.	a. Migrasi b. Konflik Internasional	a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). b. Pengembangan sektor ekonomi berkelanjutan dan inklusif. c. Penanggulangan terorisme. d. Pemberantasan narkoba. e. Peningkatan kesempatan kerja.	a. Penanggulangan kemiskinan. b. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).	a. Revolusi mental dan penguatan ideologi Pancasila. b. Dukungan penyelenggaraan pemilu serentak. c. Partisipasi masyarakat dalam politik. d. Kerukunan umat beragama. e. Pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap



pemerintah daerah. e. Koordinasi instansi vertikal.	Pendidikan politik kepada Masyarakat.					narkotika. f. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
---	---	--	--	--	--	--



1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif

Berisi ringkasan atas kinerja perangkat daerah selama tahun 2025.

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisis penjelasan umum tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, serta isu strategis perangkat daerah.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan dan dijelaskan mengenai Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja (PK) APBD dan PAPBD Tahun Anggaran 2025, serta Anggaran Program dan Kegiatan tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan tentang capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja dan sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV Penutup

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

Berisi data-data lainnya yang diperlukan diantaranya, Perjanjian Kinerja APBD dan PAPBD Tahun 2025 atau data lainnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- 5) Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
- 6) Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan / kantor kesatuan bangsa dan politik Kabupaten;
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati;

2.1.1 Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, ditetapkan Visi Kabupaten Gresik periode 2021-2026 adalah "Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah". Sedangkan untuk Misi Kabupaten Gresik Tahun 2021-2016 yaitu :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif.
2. Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota.
3. Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah.
4. Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah.
5. Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik.

Adapun berdasarkan dari penjabaran misi tersebut kemudian dituangkan dalam Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terdiri :

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan.
- b. Meningkatnya nilai-nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi dalam Masyarakat.



Untuk melaksanakan visi dan misi Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 serta untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik maka visi dan misi Rencana Strategis (RENSTRA) Bakesbangpol Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 yaitu :

I. Visi

Terwujudnya kehidupan yang dinamis, aman, damai dan menjunjung tinggi nilai persatuan kesatuan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.

II. Misi

Dalam rangka untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik menetapkan 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan, diantaranya :

- 1) Pengembangan wawasan kebangsaan kepada masyarakat.
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas berdemokrasi dalam pemilihan legislative, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa.
- 3) Pengembangan system intelijen, pencegahan dan penanganan konflik social masyarakat.
- 4) Meningkatkan kualitas pembinaan kerukunan umat beragama, organisasi, LSM dan menjalin hubungan antar Lembaga, instansi dan masyarakat.
- 5) Memberikan pelayanan prima dan berakhlak mulia.

Untuk melaksanakan visi dan misi diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten memiliki tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yaitu :

I. Tujuan

Berdasarkan Rencana Stratetegis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, adapun tujuan OPD yang ingin dicapai yaitu **“Menurunnya Konflik Sosial”**.

II. Sasaran



Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, maka sasaran yang ingin dicapai diantaranya:

- 1) Memperkuat Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan di satuan lembaga pendidikan.
- 2) Meningkatkan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik.
- 3) Memberdayakan dan mengawasi organisasi kemasyarakatan.
- 4) Membina dan mengembangkan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya.
- 5) Meningkatkan kewaspadaan nasional dan meningkatkan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.

2.1.2 Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, ditetapkan visi Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yaitu “Pembangunan Gresik Maju yang Berkelanjutan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Adapun misi yang akan dijalankan yaitu :

1. Memperkuat insan Gresik unggul yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah.
2. Percepatan pembangunan perekonomian daerah yang merata, berbasis potensi keunggulan lokal yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan serta terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

4. Meningkatkan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
5. Meningkatkan taraf hidup masyarakat Gresik melalui penciptaan lapangan kerja dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Untuk melaksanakan visi dan misi Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 serta untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik maka tujuan dan sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) Bakesbangpol Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yaitu :

I. Tujuan

Tujuan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yakni **“Mewujudkan Kohesi dan Harmonisasi Sosial dalam Kehidupan Masyarakat”**.

II. Sasaran

Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yaitu :

1. Meningkatnya hubungan yang harmoni antar kelompok berbagai kelompok sosial, budaya dan agama di masyarakat.
2. Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN.

2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025 Periode Renstra 2021-2026

Tabel 6

Sasaran Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Menurunnya Konflik Sosial	Persentase Penurunan Konflik Sosial	20%
2.	Menguatnya Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di Satuan Lembaga Pendidikan	Persentase Satuan Lembaga Pendidikan yang Menerima Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%
3.	Meningkatnya Peran Partai Politik dan Lembaga	Persentase Partisipasi Masyarakat	100%



	Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		
4.	Terwujudnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Terdaftar	100%
5.	Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Penurunan Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang Difasilitasi	100%
6.	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Kualitas Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Daerah	100%

2.3 Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025 Periode Renstra 2025-2029

Tabel 7

Sasaran Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Hubungan yang Harmoni Antar Berbagai Kelompok Sosial, Budaya dan Agama di Masyarakat	Indeks Kesadaran Berbangsa	73,09 (Indeks)
2.	Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Penanganan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	Indeks Kemandirian Partisipatif	3,95 (Indeks)



2.4 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Tabel 8

Rencana Kerja dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025

Program	Pagu APBD	Pagu PAPBD	Selisih
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.5.066.481.345,48	Rp.4.604.831.895	- Rp.461.649.450,48
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp.2.674.218.621	Rp.2.041.615.095	- Rp.632.603.526
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp.6.404.707.400	Rp.6.361.987.400	-Rp.42.720.000
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp.319.535.000	Rp.208.162.400	-Rp.111.372.600
Program Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp.2.143.199.883	Rp.1.960.745.800	-Rp.182.454.083
Program Peningkatan Kewaspadaan	Rp.6.836.829.580,26	Rp.10.278.418.650	Rp.3.441.589.069,74



Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik Sosial			
Jumlah	Rp.23.444.971.829,74	Rp.25.455.761.240	Rp.2.010.789.410,26

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

Laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik tahun 2025 diukur berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) APBD dan PAPBD Tahun 2025. Adapun pengukuran capaian kinerja tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 9

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Jumlah Nilai	Kategori
1.	91% - 100%	Sangat Tinggi
2.	76% - 90%	Tinggi
3.	66% - 75%	Sedang
4.	51% - 65%	Rendah
5.	<50%	Sangat Rendah

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

3.2.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Adapun pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2025 penyesuaian Renstra Tahun 2021-2026 dan Renstra Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 10
Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Periode Renstra Tahun 2021-2026
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik

Sasaran 1					
Menurunnya Konflik Sosial					
No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1.	Persentase Penurunan Konflik Sosial	20%	21,43%	107,15%	Sangat Tinggi
Sasaran 2					
Menguatnya Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di Satuan Lembaga Pendidikan					
No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1.	Persentase Satuan Lembaga Pendidikan yang Menerima Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
Sasaran 3					
Meningkatnya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik					
No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1.	Persentase Partisipasi Masyarakat	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
Sasaran 4					
Terwujudnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					
No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1.	Persentase Organisasi	100%	100%	100%	Sangat Tinggi



	Kemasyarakatan yang Terdaftar				
Sasaran 5					
Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya					
No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1.	Persentase Penurunan Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang Difasilitasi	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
Sasaran 6					
Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Kualitas Fasilitas Penanganan Konflik Sosial					
No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1.	Persentase Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Daerah	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 6 (enam) Indikator Kinerja Utama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik periode Renstra Tahun 2021-2026 dengan rata-rata capaian kinerja 100% dan pada kategori **Sangat Tinggi**.

Tabel 11
Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Periode Renstra Tahun 2025-2029
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik

Sasaran 1 Meningkatnya Hubungan yang Harmoni Antar Berbagai Kelompok Sosial, Budaya, dan Agama di Masyarakat					
No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1.	Indeks Kesadaran Berbangsa	73,09	79,4	108,63%	Sangat Tinggi
Sasaran 2 Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Penanganan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)					
No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1.	Indeks Kemandirian Partisipatif	3,95	4	101,27%	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik periode Renstra Tahun 2025-2029 dengan rata-rata capaian kinerja 105% dan pada kategori **Sangat Tinggi**

3.2.2 Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 12
Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021-2026

Sasaran 1 Menurunnya Konflik Sosial							
No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi					Keterangan
		2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Persentase Penurunan Konflik Sosial	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkat



Sasaran 2							
Menguatnya Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di Satuan Lembaga Pendidikan							
No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi					Keterangan
		2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Persentase Satuan Lembaga Pendidikan yang Menerima Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkat
Sasaran 3							
Meningkatnya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik							
No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi					Keterangan
		2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Persentase Partisipasi Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkat
Sasaran 4							
Terwujudnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan							
No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi					Keterangan
		2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Terdaftar	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkat
Sasaran 5							
Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya							
No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi					Keterangan
		2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Persentase Penurunan Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkat



	yang Difasilitasi						
Sasaran 6							
Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Kualitas Fasilitas Penanganan Konflik Sosial							
No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi					Keterangan
		2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Persentase Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkat

Berdasarkan tabel diatas, secara keseluruhan dari 6 (enam) Indikator Kinerja Utama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik selama periode 2021-2025 menunjukkan tren yang positif. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian realisasi tahun 2021-2025 yaitu 100%.

Tabel 13
Capaian Kinerja Renstra Tahun 2025-2029

Sasaran 1				
Meningkatnya Hubungan yang Harmoni Antar Berbagai Kelompok Sosial, Budaya, dan Agama di Masyarakat				
No.	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2024	Realisasi 2025	Keterangan
1.	Indeks Kesadaran Berbangsa	72,89	79,4	Meningkat
Sasaran 2				
Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Penanganan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika				
No.	Indikator Kinerja Utama	Baseline 2024	Realisasi 2025	Keterangan
1.	Indeks Kemandirian Partisipatif	3,94	4	Meningkat

Berdasarkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025 pada periode Renstra

Tahun 2025-2029 menunjukkan adanya tren positif. Hal tersebut dapat terlihat dari peningkatan realisasi tahun 2025 dari baseline tahun 2024.

3.2.3 Capaian Kinerja Tahun 2025 Dibandingkan Dengan Target Akhir Rencana Strategis

Tabel 14

Periode Renstra Tahun 2021-2026

Sasaran 1				
Menurunnya Konflik Sosial				
No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan
1.	Persentase Penurunan Konflik Sosial	10%	21,43%	+
Sasaran 2				
Menguatnya Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di Satuan Lembaga Pendidikan				
No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan
1.	Persentase Satuan Lembaga Pendidikan yang Menerima Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	+
Sasaran 3				
Meningkatnya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik				
No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan
1.	Persentase Partisipasi Masyarakat	100%	100%	+
Sasaran 4				
Terwujudnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				
No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan
1.	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Terdaftar	100%	100%	+
Sasaran 5				



Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya				
No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan
1.	Persentase Penurunan Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang Difasilitasi	100%	100%	+
Sasaran 6 Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Kualitas Fasilitas Penanganan Konflik Sosial				
No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan
1.	Persentase Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Daerah	100%	100%	+

Secara keseluruhan, berdasarkan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik menunjukkan tingkat kemajuan yang positif. Hal tersebut dapat terlihat dari realisasi tahun 2025 yang konsisten dari target tahun 2026.

Tabel 15
Periode Renstra Tahun 2025-2029

Sasaran 1 Meningkatnya Hubungan yang Harmoni Antar Berbagai Kelompok Sosial, Budaya, dan Agama di Masyarakat				
No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan
1.	Indeks Kesadaran Berbangsa	73,29	79,4	+
Sasaran 2 Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Penanganan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika				



No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2026	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan
1.	Indeks Kemandirian Partisipatif	3,96	4	+

Secara keseluruhan, berdasarkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik menunjukkan tingkat kemajuan yang positif. Hal tersebut dapat terlihat dari realisasi tahun 2025 yang konsisten dari target tahun 2026.

3.2.4 Perbandingan Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025 dengan Rata-Rata Capaian Nasional / Provinsi Jawa Timur / Kabupaten atau Kota Lain

Tabel 16

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

Sasaran 1 Menurunnya Konflik Sosial				
No.	Indikator Kinerja Utama	Nasional/Prov. Jatim/Kab. dan Kota Lain	Realisasi 2025	Lebih Rendah/Lebih Tinggi
1.	Persentase Penurunan Konflik Sosial	20,69% (Bakesbangpol Kota Pasuruan)	21,43%	Lebih Tinggi
Sasaran 2 Menguatnya Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di Satuan Lembaga Pendidikan				
No.	Indikator Kinerja Utama	Nasional/Prov. Jatim/Kab. dan Kota Lain	Realisasi 2025	Lebih Rendah/Lebih Tinggi
1.	Persentase Satuan Lembaga Pendidikan yang Menerima Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	N/A	100%	Tidak bisa dibandingkan
Sasaran 3				



Meningkatnya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik				
No.	Indikator Kinerja Utama	Nasional/Prov. Jatim/Kab. dan Kota Lain	Realisasi 2025	Lebih Rendah/Lebih Tinggi
1.	Persentase Partisipasi Masyarakat	100% (Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto)	100%	Sama
Sasaran 4 Terwujudnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				
No.	Indikator Kinerja Utama	Nasional/Prov. Jatim/Kab. dan Kota Lain	Realisasi 2025	Lebih Rendah/Lebih Tinggi
1.	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Terdaftar	100% (Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto)	100%	Sama
Sasaran 5 Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya				
No.	Indikator Kinerja Utama	Nasional/Prov. Jatim/Kab. dan Kota Lain	Realisasi 2025	Lebih Rendah/Lebih Tinggi
1.	Persentase Penurunan Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang Difasilitasi	100% (Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto)	100%	Sama
Sasaran 6 Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Kualitas Fasilitas Penanganan Konflik Sosial				
No.	Indikator Kinerja Utama	Nasional/Prov. Jatim/Kab. dan Kota Lain	Realisasi 2025	Lebih Rendah/Lebih Tinggi
1.	Persentase Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Daerah	N/A	100%	Tidak bisa dibandingkan

Berdasarkan data tabel diatas, dari 6 (enam) Indikator Kinerja Utama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025 periode Renstra 2021-2026 terdapat 1 (satu) IKU dengan realisasi lebih tinggi dari pada kabupaten atau kota lain. Selain itu, terdapat 3 (tiga) IKU yang realisasinya sama dengan kabupaten atau kota lain. Sedangkan 2 (dua) IKU lainnya tidak bisa dibandingkan pada tingkat nasional/provinsi/kabupaten/kota lain dikarenakan tidak terdapat data resmi.

Tabel 17
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik
Tahun 2025-2029

Sasaran 1				
Meningkatnya Hubungan yang Harmoni Antar Berbagai Kelompok Sosial, Budaya, dan Agama di Masyarakat				
No.	Indikator Kinerja Utama	Nasional/Prov. Jatim/Kab. dan Kota Lain	Realisasi 2025	Lebih Rendah/Lebih Tinggi
1.	Indeks Kesadaran Berbangsa	N/A	79,4	Tidak bisa dibandingkan
Sasaran 2				
Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Penanganan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika				
No.	Indikator Kinerja Utama	Nasional/Prov. Jatim/Kab. dan Kota Lain	Realisasi 2025	Lebih Rendah/Lebih Tinggi
1.	Indeks Kemandirian Partisipatif	3,81 (Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur)	4	Lebih Tinggi

Berdasarkan data tabel diatas, dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025 periode Renstra 2025-2029 terdapat 1 (satu) IKU dengan realisasi lebih tinggi dari pada realisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Sedangkan 1 (satu) IKU lainnya tidak bisa

dibandingkan pada tingkat nasional/provinsi/kabupaten/kota lain dikarenakan tidak terdapat data resmi.

3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Tabel 18

Periode Renstra Tahun 2021-2026

Sasaran 1 Menurunya Konflik Sosial			
No.	Indikator Kinerja Utama	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi
1.	Persentase Penurunan Konflik Sosial	Faktor pendukung : Adanya capaian realisasi kinerja yang melampaui dari target yang ditetapkan yakni sebesar 21,43% dari target yang ditetapkan sebesar 20% sehingga capaian kinerja pada sasaran ini mencapai 107,15%. Hal tersebut menunjukkan adanya keberhasilan program kinerja, efektivitas penanganan konflik maupun mediasi, adanya penguatan deteksi dini potensi konflik, serta adanya koordinasi yang baik antar lembaga yang terkait.	Nihil
Sasaran 2 Menguatnya Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di Satuan Lembaga Pendidikan			
No.	Indikator Kinerja Utama	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi
1.	Persentase Satuan Lembaga Pendidikan yang Menerima Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Faktor pendukung : Menunjukkan bahwa program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan telah dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik sudah menjangkau lembaga pendidikan	Nihil



		di Kabupaten Gresik sesuai target yang ditetapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi kinerja dan capaian kinerja sebesar 100%.	
Sasaran 3 Meningkatnya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik			
No.	Indikator Kinerja Utama	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi
1.	Persentase Partisipasi Masyarakat	Faktor pendukung : Adanya keberhasilan ketercapaian realisasi kinerja pada persentase partisipasi masyarakat sebesar 100%, mengidentifikasi bahwasanya kondisi internal dalam implementasi strategi dan implementasi program telah berjalan dengan sangat efektif. Disisi lainnya, dukungan dari eksternal yaitu peran partai politik serta lembaga pendidikan mampu mendorong partisipasi masyarakat di Kabupaten Gresik dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik.	Nihil
Sasaran 4 Terwujudnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			
No.	Indikator Kinerja Utama	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi
1.	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Terdaftar	Faktor pendukung : Ketercapaian realisasi kinerja sebesar 100% pada indikator kinerja persentase organisasi kemasyarakatan yang terdaftar, mengindikasikan bahwa organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Gresik secara terstruktur telah terdata secara	Nihil



		resmi.	
Sasaran 5 Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya			
No.	Indikator Kinerja Utama	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi
1.	Persentase Penurunan Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang Difasilitasi	Faktor pendukung : Adanya realisasi kinerja sebesar 100% pada indikator kinerja persentase penurunan penanganan konflik kerukunan umat beragama yang difasilitasi, menunjukkan bahwa program maupun kegiatan dalam pembinaan dan pencegahan konflik kerukunan umat beragama di masyarakat Kabupaten Gresik berhasil untuk diredam. Sehingga, potensi konflik dapat diredam sebelum konflik tersebut membesar.	Nihil
Sasaran 6 Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Kualitas Fasilitas Penanganan Konflik Sosial			
No.	Indikator Kinerja Utama	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi
1.	Persentase Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Daerah	Faktor pendukung : Pencapaian realisasi kinerja sebesar 100%, menunjukkan bahwa dalam pembentukan FKDM di Kabupaten Gresik didukung adanya infrastruktur dasar untuk pelaksanaan program maupun kegiatan kewaspadaan dini. Selain itu, adanya faktor pendukung lain seperti regulasi yang jelas, sosialisasi yang aktif, serta adanya peran dari pemerintah, masyarakat dan tokoh masyarakat yang aktif mendorong ketercapaian kinerja	Nihil



	yang ada.	
--	-----------	--

Tabel 19
Periode Renstra Tahun 2025-2029

Sasaran 1 Meningkatnya Hubungan yang Harmoni Antar Berbagai Kelompok Sosial, Budaya dan Agama di Masyarakat			
No.	Indikator Kinerja Utama	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi
1.	Indeks Kesadaran Berbangsa	Faktor pendukung : Masyarakat Kabupaten Gresik memiliki tingkat kesadaran berbangsa yang baik. Hal ini mencerminkan pemahaman dan penerapan nilai kebangsaan, tanggung jawab sosial, kepatuhan terhadap hukum, serta partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa pada kategori tinggi.	
Sasaran 2 Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Penanganan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika			
No.	Indikator Kinerja Utama	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi
1.	Indeks Kemandirian Partisipatif	Faktor pendukung : Keberhasilan realisasi kinerja pada Indeks Kemandirian Partisipatif yang diatas target tahun 2025, tidak terlepas dari adanya keberhasilan peran dari Bakesbangpol Kabupaten Gresik dan BNN Kabupaten Gresik. Selain itu, terdapat faktor pendukung lainnya yang menyumbang ketercapaian kinerja diantaranya : 1. Kolaborasi dengan Pengurus Kader Inti Pemuda Anti Narkotika (KIPAN)	Nihil



		Kabupaten Gresik Bersama DISPAREKRAFBUDPORA Kabupaten Gresik. 2. Adanya program kerja pemberdayaan masyarakat dalam P4GN. 3. Adanya pendekatan advokasi pembekalan P4GN di Kabupaten Gresik.	
--	--	---	--

3.2.6 Alokasi Anggaran Dalam Pencapaian Tujuan

Tabel 20

Alokasi Anggaran Renstra Tahun 2021-2026

Sasaran 1					
Menurunnya Konflik Sosial					
No.	Indikator Kinerja Utama	Alokasi	Pagu Anggaran PAPBD	Realisasi PAPBD	Capaian
1.	Persentase Penurunan Konflik Sosial	18,1%	4.604.831.895,00	4.037.931.913,26	87,69%
Sasaran 2					
Menguatnya Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di Satuan Lembaga Pendidikan					
No.	Indikator Kinerja Utama	Alokasi	Pagu Anggaran PAPBD	Realisasi PAPBD	Capaian
1.	Persentase Satuan Lembaga Pendidikan yang Menerima Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8,02%	2.041.615.095,00	1.742.726.904,19	85,36%
Sasaran 3					
Meningkatnya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik					
No.	Indikator Kinerja Utama	Alokasi	Pagu Anggaran PAPBD	Realisasi PAPBD	Capaian
1.	Persentase Partisipasi Masyarakat	25%	6.361.987.400,00	6.247.194.242,50	98,20%
Sasaran 4					
Terwujudnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					
No.	Indikator Kinerja Utama	Alokasi	Pagu Anggaran PAPBD	Realisasi PAPBD	Capaian
1.	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Terdaftar	0,81%	208.162.400,00	113.898.500,00	54,72%



Sasaran 5 Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya					
No.	Indikator Kinerja Utama	Alokasi	Pagu Anggaran PAPBD	Realisasi PAPBD	Capaian
1.	Persentase Penurunan Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang Difasilitasi	7,7%	1.960.745.800,00	1.622.957.100,00	82,77%
Sasaran 6 Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Kualitas Fasilitas Penanganan Konflik Sosial					
No.	Indikator Kinerja Utama	Alokasi	Pagu Anggaran PAPBD	Realisasi PAPBD	Capaian
1.	Persentase Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Daerah	40,37%	10.278.418.650,00	9.647.289.344,97	93,86
Jumlah			25.455.761.240,00	23.411.998.004,92	91,97%

Berdasarkan data alokasi anggaran pada Renstra Tahun 2021-2026 dari pagu PAPBD sebesar Rp.25.455.761.240,00 dapat terserap sebesar Rp.23.411.998.004,92. Dari 6 (enam) IKU, terdapat 2 (dua) IKU dengan realisasi anggaran pada kategori sangat tinggi. Selain itu, terdapat 3 (tiga) IKU dengan realisasi anggaran pada kategori tinggi. Sedangkan 1 (satu) IKU dengan realisasi anggaran pada kategori rendah. Oleh karena itu, secara keseluruhan rata-rata capaian anggaran tahun 2025 yaitu sebesar 91,97% dengan kategori sangat tinggi.

Tabel 21
Alokasi Anggaran Renstra Tahun 2025-2029

Sasaran 1 Meningkatnya Hubungan yang Harmoni Antar Berbagai Kelompok Sosial, Budaya, dan Agama di Masyarakat					
No.	Indikator Kinerja Utama	Alokasi	Pagu Anggaran PAPBD	Realisasi PAPBD	Capaian
1.	Indeks Kesadaran Berbangsa	92,3%	23.495.015.440,00	21.789.040.904,92	92,73%
Sasaran 2 Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Penanganan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika					
No.	Indikator Kinerja Utama	Alokasi	Pagu Anggaran PAPBD	Realisasi PAPBD	Capaian
1.	Indeks Kemandirian Partisipatif	7,7%	1.960.745.800,00	1.622.957.100,00	82,77%
Jumlah			25.455.761.240,00	23.411.998.004,92	91,97%

Berdasarkan data alokasi anggaran pada Renstra Tahun 2025-2029 dari pagu PAPBD sebesar Rp.25.455.761.240,00 dapat terserap sebesar Rp.23.411.998.004,92. Dari 2 (dua) IKU, terdapat 1 (satu) IKU dengan realisasi anggaran pada kategori sangat tinggi. Sedangkan 1 (satu) IKU lainnya dengan realisasi anggaran pada kategori tinggi. Oleh karena itu, secara keseluruhan rata-rata capaian anggaran tahun 2025 yaitu sebesar 91,97% dengan kategori sangat tinggi.



3.2.7 Efektifitas Penggunaan Sumber Daya

Tabel 22

**Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik
Tahun 2021-2026**

Sasaran 1 Menurunnya Konflik Sosial				
No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Capaian PAPBD	Efisiensi
1.	Persentase Penurunan Konflik Sosial	107,15%	87,69%	12,31%
Sasaran 2 Menguatnya Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di Satuan Lembaga Pendidikan				
No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Capaian PAPBD	Efisiensi
1.	Persentase Satuan Lembaga Pendidikan yang Menerima Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	85,36%	14,63%
Sasaran 3 Meningkatnya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik				
No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Capaian PAPBD	Efisiensi
1.	Persentase Partisipasi Masyarakat	100%	98,20%	1,8%
Sasaran 4 Terwujudnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				
No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Capaian PAPBD	Efisiensi
1.	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Terdaftar	100%	54,72%	45,28%
Sasaran 5 Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya				
No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Capaian PAPBD	Efisiensi



1.	Persentase Penurunan Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang Difasilitasi	100%	82,77%	17,22%
Sasaran 6 Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Kualitas Fasilitas Penanganan Konflik Sosial				
No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Capaian PAPBD	Efisiensi
1.	Persentase Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Daerah	100%	93,86%	6,14%
		101,19%	91,97%	8,03%

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwasanya dari total keseluruhan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama realisasi capaian kinerja pada kategori Sangat Tinggi. Sedangkan untuk rata-rata capaian kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebesar 101,19% dengan kategori Sangat Tinggi.

Tabel 23
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik
Tahun 2025-2029

Sasaran 1				
Meningkatnya Hubungan yang Harmoni Antar Berbagai Kelompok Sosial, Budaya, dan Agama di Masyarakat				
No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Capaian PAPBD	Efisiensi
1.	Indeks Kesadaran Berbangsa	108,63%	92,73%	7,26%
Sasaran 2				
Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Penanganan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika				
No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Capaian PAPBD	Efisiensi
1.	Indeks Kemandirian Partisipatif	101,27%	82,77%	17,22%
		105%	91,97%	8,03%

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwasanya dari total keseluruhan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama realisasi capaian kinerja pada kategori Sangat Tinggi. Sedangkan untuk rata-rata capaian kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebesar 105% dengan kategori Sangat Tinggi.

3.2.8 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 24

Program/Kegiatan Penunjang Renstra Tahun 2021-2026

Sasaran 1 Menurunnya Konflik Sosial		
No.	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan Penunjang
1.	Persentase Penurunan Konflik Sosial	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Sasaran 2 Menguatnya Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di Satuan Lembaga Pendidikan		
No.	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan Penunjang
1.	Persentase Satuan Lembaga Pendidikan yang Menerima Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Sasaran 3 Meningkatnya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		
No.	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan Penunjang
1.	Persentase Partisipasi Masyarakat	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
Sasaran 4 Terwujudnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		
No.	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan Penunjang
1.	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Terdaftar	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Sasaran 5 Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya		
No.	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan Penunjang
1.	Persentase Penurunan Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang Difasilitasi	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Sasaran 6 Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Kualitas Fasilitas Penanganan Konflik Sosial		



No.	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan Penunjang
1.	Persentase Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Daerah	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Secara keseluruhan terdapat 6 (enam) Indikator Kinerja Utama realisasi capaian kinerja pada kategori Sangat Tinggi. Sedangkan untuk rata-rata capaian kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebesar 101,19% dengan kategori Sangat Tinggi.

Tabel 25

Program/Kegiatan Penunjang Renstra Tahun 2025-2029

Sasaran 1 Meningkatnya Hubungan yang Harmoni Antar Berbagai Kelompok Sosial, Budaya, dan Agama di Masyarakat		
No.	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan Penunjang
1.	Indeks Kesadaran Berbangsa	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. 3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik. 4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. 5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.
Sasaran 2		
No.	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan Penunjang
1.	Indeks Kemandirian Partisipatif	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya



Secara keseluruhan terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama realisasi capaian kinerja pada kategori Sangat Tinggi. Sedangkan untuk rata-rata capaian kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebesar 105% dengan kategori Sangat Tinggi.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Hasil Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik, merupakan pertanggungjawaban atas capaian kinerja maupun capaian anggaran pada Tahun Anggaran 2025 Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang sudah ditetapkan pada periode Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 serta Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Sebagaimana juga yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 periode Renstra Tahun 2021-2026 penyesuaian APBD dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 periode Renstra Tahun 2025-2029 yang berisi uraian tentang realisasi capaian kinerja dan capaian anggaran dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja dan capaian PAPBD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025 dalam kategori Sangat Tinggi. Oleh karena itu, capaian yang ada dapat dipertahankan dan ditingkat pada rencana kinerja kedepan.

4.2 Rekomendasi Kebijakan

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan untuk rencana kinerja kedepannya diantaranya yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dengan menyiapkan dukungan anggaran, Sumber Daya Manusia (SDM), fasilitas, dan kemampuan aparatur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
2. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak atau mitra seperti masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, instansi vertikal, akademisi, organisasi kemasyarakatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.
3. Mempertajam fungsi deteksi dini dan kewaspadaan dini terhadap hal-hal yang dapat mengganggu kondusivitas wilayah dengan meningkatkan program kerja dan kegiatan yang berkaitan dengan Pendidikan politik dan



pendidikan wawasan kebangsaan bagi masyarakat terutama generasi muda dan partai politik serta pemberdayaan dan pengawasan ormas.

4. Mengintensifkan deteksi dini dan pencegahan dini potensi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Gresik.



LAMPIRAN

- A. Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025 Penyesuaian APBD Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026.
- B. Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025 Penyesuaian PAPBD Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NANANG SETIAWAN, S.IP, M.Si

Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : FANDI AKHMAD YANI

Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 20 Januari 2025

PIHAK KESATU
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



NANANG SETIAWAN, S.IP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197003101990031001

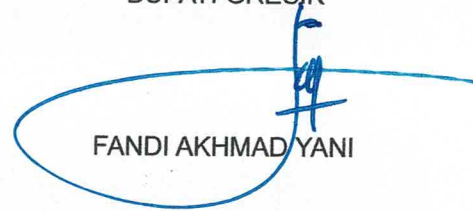
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Menurunnya konflik sosial	1	Persentase penurunan Konflik Sosial	20 %
2	Menguatnya ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan di satuan Lembaga Pendidikan	1	Persentase satuan Lembaga Pendidikan yang menerima penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100 %
3	Meningkatnya peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	1	Persentase partisipasi masyarakat	100 %
4	Terwujudnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	1	Persentase organisasi kemasyarakatan yang terdaftar	100 %
5	Terwujudnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	1	Persentase penurunan penanganan konflik kerukunan umat beragama yang difasilitasi	100 %
6	Meningkatnya kewaspadaan nasional dan kualitas fasilitasi penanganan konflik sosial	1	Persentase pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di daerah	100 %

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 5,066,481,345.48	APBD
2	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Rp. 2,674,218,621.00	APBD
3	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rp. 6,404,707,400.00	APBD
4	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Rp. 319,535,000.00	APBD
5	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Rp. 2,143,199,883.00	APBD

6	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Rp. 6,836,829,580.26	APBD
Jumlah			Rp. 23,444,971,829.74	

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK


FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 20 Januari 2025
PIHAK KESATU
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


NANANG SETIAWAN, S.IP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197003101990031001





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NANANG SETIAWAN, S.IP, M.Si
Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : FANDI AKHMAD YANI
Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK


FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 9 Oktober 2025

PIHAK KESATU
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



NANANG SETIAWAN, S.IP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197001051990031008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya hubungan yang harmoni antar berbagai kelompok sosial, budaya dan agama di masyarakat	1	Indeks kesadaran berbangsa	73.09 Indeks
2	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika (P4GN)	1	Indeks kemandirian partisipatif	3.95 Indeks

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 4,604,831,895.00	PAPBD
2	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Rp. 2,041,615,095.00	PAPBD
3	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rp. 6,361,987,400.00	PAPBD
4	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Rp. 208,162,400.00	PAPBD
5	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Rp. 1,960,745,800.00	PAPBD
6	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Rp. 10,278,418,650.00	PAPBD
Jumlah			Rp. 25,455,761,240.00	

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

FANDI AKHMAD YANI



Gresik, 9 Oktober 2025

PIHAK KESATU
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



NANANG SETIAWAN, S.IP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197001051990031008





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

3952825-30



kesbangpol.gresikkab.go.id



bakesbangpol@gresikkab.go.id

